

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SEKOLAH DALAM MENANGGULANGI KENAKALAN REMAJA DI KOTA YOGYAKARTA

(THE IMPLEMENTATION OF SCHOOL POLICYON IN OVERCOME JUVENILE DELINDUENCY IN YOGYAKARTA)

Oleh: Fitri Utami, Jurusan Filsafat dan Sosiologi Pendidikan, Program studi Kebijakan Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta, email: *fitutam@gmail.com*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) Implementasi Kebijakan Sekolah dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja; (2) Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pelaksanaan Implementasi Kebijakan Sekolah. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan di SMK Negeri 2 Yogyakarta dan SMA Negeri 9 Yogyakarta dengan subyek penelitian adalah Wakil Kepala Sekolah bidang Kesiswaan, Guru, Wali Kelas, Karyawan, dan Siswa. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara, observasi dan studi dokumen. Teknik analisis menggunakan model interaktif *Milles and Huberman* yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan data dengan triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Implementasi Kebijakan Sekolah dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja tersusun dalam upaya penanggulangan kuratif berupa sosialisasi yang diberikan dari Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta; Kepolisian; serta Badan Narkotika Nasional. Upaya penanggulangan representatif berupa aturan-aturan sekolah yang diterapkan dalam keseharian serta harus ditaati oleh peserta didik. Upaya penanggulangan preventif berupa teguran bagi siswa yang melanggar peraturan tata tertib sekolah. 2) Faktor Pendukung: komitmen tinggi dari semua warga sekolah dan orangtua, relasi yang dijalin, serta partisipasi aktif dari semua pihak. Faktor Penghambat: sumber daya yang belum optimal, perbedaan penanganan antar pendidik, dan hukuman yang kurang tegas.

Kata Kunci: Kebijakan Sekolah, Kenakalan Remaja, Upaya Penanggulangan.

Abstract

The current research aims to describe: (1) the implementation of school policy in overcome juvenile delinquency in Yogyakarta; (2) The supporting factor and the barriers in the implementation of the school policy. The research is the qualitative study. The research was conducted in SMK Negeri 2 Yogyakarta and SMA Negeri 9 Yogyakarta with the subject of research is the vice principal, teachers, class representative, employees, and students. The data gathering techniques is interview, observation and documents analysis. Milles and Huberman interactive model was used as the analysis techniques included source triangulation. Based on the the reduction of the data, presentation of data, and the withdrawal of conclusion. Firstly, the implementation of school policy in overcome juvenile delinquency in yogyakarta are arranged in reduction programs and policies of curative composed of socialization gien Education Office of Yogyakarta, the police, and the National Narcotica Agency. Representative in the form of

rules school are applied in everyday and must be obeyed by learner. Preventive prevention efforts in the form of a reprimand for students who violate school rules. Secondly, the supporting factors: high commitment and active participation of all parties, and then relation which is woven. The barriers: the limited means not yet optimal and think of consciousness is weak.

Keyword: School Policy , Juvenile Delinquency , Overcome Efforts.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang semakin pesat dapat menimbulkan permasalahan salah satunya pada dunia pendidikan. Masalah yang terjadi bersifat kompleks dan permasalahan tersebut biasanya terjadi pada kalangan remaja. Permasalahan yang dialami remaja usia sekolah yang dipengaruhi oleh hal-hal negatif nantinya akan menjadi penyimpangan perilaku. Perilaku menyimpang yang dialami remaja usia sekolah antara lain seperti; merokok, minum-minuman keras, tawuran antar pelajar, keluar lingkungan sekolah tanpa izin atau membolos, mengambil barang milik orang lain serta melakukan tindak kekerasan baik yang nampak maupun tidak seperti *bullying*. Peran sekolah sangat penting dalam melakukan pencegahan kenakalan

remaja dengan memberikan bimbingan kepada peserta didik.

Perilaku menyimpang yang dilakukan pelajar tidak sejalan dengan tujuan pendidikan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas (Nanang Fattah, 2012:38) menyatakan bahwa: "Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara."

Tujuan pendidikan tersebut tidaklah sesuai dengan perilaku menyimpang yang terus menerus

terjadi dikalangan remaja. Fenomena kenakalan remaja ini jika terus dibiarkan akan mengarah pada tindakan kriminal.

Dengan adanya kondisi tersebut sekolah menerapkan kebijakan dan program-program dalam menanggulangi kenakalan remaja. Namun strategi tersebut belum banyak diketahui oleh sekolah-sekolah yang belum mampu menanggulangi kenakalan remaja (siswa), sehingga perlu adanya identifikasi kebijakan yang diterapkan sekolah dalam menanggulangi kenakalan remaja.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan sekolah dalam menanggulangi kenakalan remaja dan faktor pendukung serta penghambat.

Perilaku membolos di sekolah dimasukkan dalam kategori kekerasan pendidikan karena melanggar peraturan sekolah khususnya saat jam pelajaran. Perilaku membolos ini akan menimbulkan perilaku kekerasan seperti tawuran antar pelajar. “Di Yogyakarta sendiri sebanyak 34

siswa membolos saat jam belajar yang terjaring razia Dinas Ketertiban Kota Jogja, selama 2016 hingga Februari. Sebagian besar mereka dirazia di warnet, kios game online. Ada juga di tempat tongkrongan, di warung makan dan di lapangan” kata kepala seksi pembinaan, ketentraman, dan ketertiban, Dinas Ketertiban Kota Jogja, Murjoko, se usai menggelar razia. (Meidani Dyah Natalia, Harian Jogja, 23 Februari 2016).

Kondisi tersebut memerlukan perhatian dari lembaga pendidikan, dengan merumuskan kebijakan dan program dalam melakukan kebijakan dan penanganan kenakalan remaja. Dinas Pendidikan yang merupakan kendali dari lembaga sekolah harus membuat kebijakan yang nantinya bekerjasama dengan sekolah-sekolah. Menurut Hugh Hecllo dalam Arif Rohman (2014:108), kebijakan adalah cara bertindak yang disengaja untuk menyelesaikan beberapa permasalahan.

George C. Edwads III (1980), dalam Subarsono (2008:90-92) menyatakan bahwa suatu keputusan kebijakan tanpa implementasi tidak

akan mencapai kesuksesan. Edwards mengajukan empat faktor atau variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yakni, komunikasi, sumber daya, sikap, dan struktur birokrasi.

Arif Rohman (2009: 147-149) mengemukakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proses kegagalan dan keberhasilan implementasi kebijakan. Ada tiga faktor yaitu: (a) faktor yang terletak pada rumusan kebijakan, (b) faktor yang terletak pada personil pelaksana, dan (c) faktor yang terletak pada sistem organisasi pelaksana.

Menurut Sofyan S. Willis (2012: 90) kenakalan remaja ialah tindak perbuatan remaja yang bertentangan dengan hukum, agama dan norma-norma masyarakat, sehingga akibatnya akan merugikan orang lain, mengganggu ketentraman umum dan merusak dirinya sendiri.

Bimbingan berupa pengarahan anak pada pilihan yang cocok untuk mendapat moral yang lebih baik. Masalah remaja terjadi tidak hanya dari dalam individu itu

sendiri tetapi juga dari faktor luar termasuk lingkungan atau masyarakat setempat.

Menurut Soerjono Soekamto dalam Emile H Tambunan (1987: 23-24) masalah kenakalan bukanlah masalah yang berdiri sendiri, akan tetapi merupakan bagian dari masalah-masalah sosial lainnya yang dihadapi oleh masyarakat.

Menurut Willis (2012:128) suatu kebijakn akan dapat dilaksanakan secara seimbang jika sekolah membuat berbagai kebijakan yang bersifat kuratif, represif dan preventif. Dalam rangka menegakkan peraturan sekolah, guru tidak boleh melaksanakan penindakan secara semena-mena atau penuduhan, namun hanya boleh sekedar investigasi dan pencapaian solusi.

Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasa di Lingkungan satuan pendidikan, memaparkan dalam menangani kekerasan dimulai dari penanggulangan terhadap (1) tindak kekerasan terhadap siswa; (2) tindak kekerasan yang terjadi disekolah; (3)

tindak kekerasan dalam kegiatan sekolah yang diluar sekolah; dan (4) tawuran antar pelajar, pemberian sanksi, dan pencegahan oleh sekolah.

Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian ini yaitu dilakukan oleh Ike Wulandari tahun 2014 dari Universitas Negeri Yogyakarta. Berdasarkan hasil penelitian Ike dapat diketahui bahwa dalam mengatasi kenakalan remaja sekolah membuat peraturan yang tegas, namun jika siswa masih membangkang maka siswa dikembalikan ke orang tua berdasarkan data yang akurat. Sekolah juga membatasi jam siswa berada dilingkungan sekolah, agar siswa tidak melakukan tindakan kenakalan dalam bentuk ringan. Pelaksanaan kebijakan sekolah mendapat faktor pendukung yaitu peran komite sekolah yang selalu membantu siswa menyelesaikan masalah.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2010:1),

menjelaskan bahwa metode penelitian dengan pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen), dimana peneliti sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi dan analisis data bersifat induktif.

Setting Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SMK Negeri 2 Yogyakarta yang berlokasi di Jalan A.M Sangaji No. 47 Yogyakarta dan SMA Negeri 9 Yogyakarta yang berlokasi di Jalan Sagan No. 1 Yogyakarta.

Subyek Penelitian

Subyek dalam penelitian ini adalah Kepala Sekolah, Wakil Kepala Bidang Kesiswaan, Guru Bimbingan dan Konseling, Beberapa Guru/ Wali Kelas, dan Beberapa Siswa sebagai pelaku *juvenile delinquency*.

Prosedur Penelitian

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara, observasi, dan studi dokumen, dimana peneliti sebagai *human instrument*. Teknik analisis

data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif Miles and Huberman yang terdiri dari pengumpulan data, penyajian data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan (Milles dan Huberman, 1992: 16-20). Teknik keabsahan data yang digunakan adalah dengan ketekunan pengamatan dan triangulasi sumber (Moleong, 2014: 330-331).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Yogyakarta sebagai Kota pelajar yang mempunyai kepedulian tinggi terhadap pendidikan. Pendidikan tidak hanya bersifat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi juga menanamkan kepribadian yang baik melalui pendidikan karakter.

SMK Negeri 2 Yogyakarta yang mempunyai peserta didik terbanyak di Kota Yogyakarta. SMA Negeri 9 Yogyakarta yang dirasa sudah mampu menanggulangi kenakalan remaja seperti tawuran yang dulu terjadi. Dengan demikian, peneliti mencoba untuk menggali bagaimana implementasi kebijakan penanggulangan kenakalan remaja di Kota Yogyakarta dengan mengambil

sampel SMK Negeri 2 Yogyakarta dan SMA Negeri 2 Yogyakarta atas rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.

1. Implementasi Kebijakan Sekolah dalam Mennanggulangi Kenakalan Remaja di Kota Yogyakarta

Kebijakan merupakan serangkaian program yang dilakukan untuk memecahkan masalah atau hambatan-hambatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan upaya penanggulangan kenakalan remaja dibagi menjadi tiga upaya yaitu kuratif, represif, dan preventif. Adapun kebijakan yang telah diterapkan di SMK Negeri 2 Yogyakarta dan SMA Negeri 9 Yogyakarta dalam menanggulangi kenakalan remaja yaitu: peraturan sekolah, pembatasan jam siswa berada dilingkungan sekolah, pengembalian siswa kepada orang tua dengan bukti yang kuat, pemberian sanksi yang mendidik sebagai efek jera, pengembangan pendidikan karakter, menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif dan layanan Bimbingan dan Konseling.

Kenakalan yang terjadi diantaranya ikut *geng*, membolos, corat-coret (*vandalism*), terlambat masuk sekolah, tidak berangkat tanpa ijin, tidak memakai sepatu hitam, tidak memakai seragam sesuai aturan, mencontek, model pakaian yang tidak formal, rambut gondrong, bergurau saat pelajaran, bermain HP saat proses kegiatan belajar mengajar berlangsung, tidak mengerjakan tugas, tidak ikut kegiatan ekstrakurikuler wajib (pramuka), dan membuang sampah tidak pada tempatnya.

Faktor-faktor penyebab terjadinya kenakalan remaja Faktor penyebab terjadinya kenakalan remaja adalah faktor dari sekolah, faktor lingkungan seperti teman sebaya, faktor keluarga, dan alumni. Walaupun tingkat kenakalan yang terjadi berada di dalam kategori ringan hingga sedang apabila dibiarkan akan meningkat dan menuju pada kenakalan dalam skala berat.

Berdasarkan teori implementasi Edward III (1980), dalam Subarsono (2008:90-92)

menyatakan bahwa suatu keputusan kebijakan tanpa implementasi tidak akan mencapai kesuksesan. Edwards mengajukan empat faktor atau variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yakni, komunikasi, sumber daya, sikap, dan struktur birokrasi.

a. Komunikasi

Dalam proses komunikasi di SMK Negeri 2 Yogyakarta dan SMA Negeri 9 Yogyakarta terjadi sosialisasi, sosialisasi tersebut ditujukan khususnya kepada peserta didik. Sosialisasi dilakukan pada saat MOS (Masa Orientasi Siswa) dengan memberikan gambaran dan peraturan di SMK Negeri 2 Yogyakarta. Selain itu, peserta didik baru wajib mengisi formulir berupa pernyataan untuk tidak melanggar peraturan tata tertib sekolah.

b. Sumber Daya

Sumber daya merupakan faktor penting dalam proses implementasi kebijakan. Sumber daya yang efektif dan efisien dapat mendukung proses implementasi kebijakan sehingga proses tersebut dapat berjalan secara efektif. Sumber daya SMK Negeri 2

Yogyakarta dan SMA Negeri 9 Yogyakarta yang tersedia adalah sumber daya manusia yaitu melibatkan seluruh warga sekolah, metode yaitu cara penanganan, sumber daya anggaran yang diperoleh melalui APBN dan APBD, serta sumber daya sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Sumber daya yang dimiliki SMA Negeri 9 Yogyakarta berupa sumber daya manusia terdiri dari kepala sekolah; guru; wali kelas; serta BK, selain itu juga ada sumber anggaran, dan peralatan.

c. Sikap Warga Sekolah

Semua warga sekolah di SMK Negeri 2 Yogyakarta dan SMA N 9 Yogyakarta mendukung program-program yang dibuat sekolah. Keterlibatan langsung ditunjukkan dengan memberikan informasi terkait bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh peserta didik kepada pelaksana kebijakan. Dampak yang ditimbulkan dari kebijakan penanggulangan kenakalan remaja sangat terlihat dan dirasakan oleh semua warga sekolah. Respon siswa

terhadap kebijakan penanggulangan kenakalan remaja baik.

d. Struktur Birokrasi

Perumusan kebijakan di SMK Negeri 2 Yogyakarta sesuai dengan prosedur, pengelola sekolah menyusun rencana program sekolah, kemudian koordinasi dengan komite sekolah terkait rencana tersebut. Terkait struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan sekolah dalam menanggulangi kenakalan remaja (siswa) kaitannya dengan komunikasi baik dengan pihak di dalam lingkungan sekolah maupun dengan instansi luar sekolah.

Dasar hukum dalam pembuatan kebijakan di SMA Negeri 9 Yogyakarta adalah Undang-undang Sisdiknas, Keputusan Menteri pendidikan dan kebudayaan, Peraturan Wali Kota Yogyakarta, serta Visi dan Misi sekolah. Kerjasama yang dibangun dari berbagai pihak terkait baik internal maupun eksternal. Kerjasama dari dalam yaitu dengan warga sekolah, sedangkan relasi yang dibangun dari luar seperti KUA, Kepolisian, serta Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat

a. Faktor Pendukung

Faktor pendukung implementasi kebijakan penanggulangan kenakalan remaja di SMK Negeri 2 Yogyakarta antara lain; 1) Komite sekolah yang berkomitmen terhadap kemajuan sekolah, 2) Partisipasi aktif orang tua siswa, 3) Masyarakat yang turut mendukung kemajuan sekolah, 4) Adanya forum pembinaan dan pengembangan karakter dari Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, 5) Relasi yang dibangun SMK Negeri 2 Yogyakarta baik dan saling berkoordinasi baik pihak sekolah maupun di luar sekolah, dan 6) Adanya forum yang dibentuk dengan melibatkan semua Wakil kepala sekolah bagian kesiswaan se-Kota Yogyakarta.

Sedangkan, faktor pendukung proses implementasi kebijakan penanggulangan kenakalan remaja di SMA Negeri 9 Yogyakarta adalah; 1) Komitmen tinggi dari semua warga sekolah dan orang tua, 2) Keterbukaan orangtua terhadap sekolah, 3) Semua pihak terkait seperti warga sekolah; masyarakat;

dan orang tua siswa ikut berpartisipasi aktif, 4) Dukungan motivasi positif dari alumni, 5) Relasi yang dibangun SMK Negeri 2 Yogyakarta baik dan saling berkoordinasi baik pihak sekolah maupun di luar sekolah, dan 6) Adanya forum yang dibentuk dengan melibatkan semua Wakil kepala sekolah bagian kesiswaan se-Kota Yogyakarta.

b. Faktor Penghambat

Faktor penghambat yang dihadapi sekolah dalam mengatasi kenakalan remaja di SMK Negeri 2 Yogyakarta yaitu; 1) Sumber daya yang belum optimal, 2) Masih terdapat perbedaan penanganan masalah antar pendidik, 3) Kepedulian warga sekolah yang belum maksimal, dan 4) Alumni yang mempunyai sejarah kurang baik, berusaha untuk mempengaruhi siswa melalui berbagai kegiatan.

Sedangkan, Faktor penghambat dalam proses implementasi kebijakan penanggulangan kenakalan remaja di SMA Negeri 9 Yogyakarta adalah; 1) Hukuman yang dilaksanakan kurang tegas, 2) Komunikasi yang terjalin kepada beberapa orang tua kurang

mendapat respon, dan 3) Tidak ada jam masuk kelas untuk guru Bimbingan dan Konseling.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Implementasi kebijakan sekolah dalam menanggulangi kenakalan remaja di Kota Yogyakarta tersusun dalam kebijakan upaya kuratif, represif, dan preventif pelaksanaan kebijakan tersebut telah didukung dengan komunikasi dari pihak-pihak terkait dalam penanggulangan kenakalan remaja, sumber daya berupa sumber daya manusia, sumber daya keuangan berasal dari dana APBD dan APBN, disposisi atau sikap, dan struktur birokrasi. Penanggulangan kenakalan remaja berupa peraturan tata tertib sekolah, pembatasan jam siswa berada di lingkungan sekolah, pemberian sanksi hingga anak dikembalikan kepada orang tua, layanan Bimbingan dan Konseling, serta pengembangan pendidikan karakter. Program-program yang dilaksanakan dapat menanggulangi kenakalan remaja skala berat menjadi skala sedang bahkan dapat dikatakan ringan.

Faktor Pendukung: komitmen tinggi dari semua warga sekolah dan orang tua, relasi yang dijalin, serta partisipasi aktif dari semua pihak. Faktor Penghambat: keterbatasan sumber daya yang belum optimal, rasa kesadaran yang masih kurang, perbedaan penanganan antar pendidik, dan hukuman yang kurang tegas.

Saran

Sekolah perlu mengadakan pertemuan rutin bersama seluruh warga sekolah, dalam rangka membahas pelaksanaan kebijakan dan program dalam menanggulangi kenakalan remaja agar tidak terjadi perbedaan penanganan karena akan menimbulkan kebingungan terhadap siswa. Sosialisasi secara rutin terhadap orang tua dan masyarakat tentang peraturan dan kebijakan sekolah. Pembinaan dilakukan oleh guru BK minimal dilaksanakan dua minggu sekali di dalam kelas, mengingat layanan BK sebagai pencegahan dan pembinaan kenakalan remaja.

Daftar Pustaka

Arif Rohman. (2009). *Politik Ideologi Pendidikan.*

Yogyakarta: Laksbang
Mediatama.

Kekerasan di Lingkungan
Satuan Pendidikan.

_____. (2014). *Kebijakan Pendidikan Analisis Dinamika Formulasi dan Implementasi*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

Emil H. Tambunan. (1987). *Mencegah Kenakalan Remaja*. Bandung: Indonesia Publishing House.

Meidani Dyah Natalia. (2016). *34 Siswa Bolos Sekolah Terjaring di Warnet Hingga Warung Makan*. Harian Jogja.com.

Nanang Fattah (2012). *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Miles. B. mattew & Michael Hubberman. (1992). *Anslisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.

Sofyan S. Willis. (2005). *Remaja dan Masalahnya Mengupas Berbagai Bentuk Kenakalan Remaja seperti Narkoba, Free sex dan Pemecahannya*. Bandung: Alfabeta.

Subarsono. (2008). *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. (2010). *Memahami Penenelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak